



► DANA DESA

## Alokasi Tahun Ini Rp168 Miliar

WONOSARI—Gunungkidul di tahun ini mendapatkan alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp168.808.759.000. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah karena adanya kebijakan insentif dana desa yang diberikan saat pertengahan tahun.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul Khoiru Rahmat mengatakan pagu dana desa bersumber dari Pemerintah Pusat sudah ditetapkan sebesar Rp168.808.759.000.

Jumlah ini terdiri dari alokasi dasar Rp100.491.934.000 dan alokasi formula Rp62.629.605.000. "Selain itu, juga ada alokasi kinerja Rp5.687.220.000 sehingga total jumlahnya untuk 144 kalurahan di Gunungkidul sebesar Rp168,8 miliar," kata Khoiru, Rabu (15/1).

Dari sisi besaran, jumlah yang dialokasikan di 2025 berkurang ketimbang penyaluran di 2024. Tahun lalu, pagu dana desa yang diberikan sebesar Rp181 miliar. Meski demikian, pagu yang diberikan di tahun ini masih juga bisa bertambah karena masih ada formulasi insentif dana desa yang diberikan ke kalurahan-kalurahan yang dinilai berprestasi.

Pada Tahun lalu ada 29 kalurahan yang mendapat insentif dana desa dengan

besaran 20% dari alokasi yang diterima. Tapi, untuk 2025 masih belum pasti karena menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan ketentuan, dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai desa sebesar 15% dari pagu yang diterima serta penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, ada peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*.

Selanjutnya, dana desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan; pengembangan potensi dan keunggulan desa; pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.

Dana juga untuk pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau program sektor prioritas lainnya di desa. "Pemanfaatannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," ucap Khoiru.

Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu, Suhadi, memaparkan hingga saat ini belum mendapatkan informasi resmi berkaitan dengan besaran dana desa yang diberikan di 2025. Oleh karena itu, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) menggunakan pagu dana desa yang diberikan di 2024.

(David Kurniawan)